

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab. Parigi Moutong Tahun 2023. RKPD Kab. Parigi Moutong Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (top- down/bottom up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Parigi Moutong. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan,

Penyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui tahapan : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023; serta (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Melalui tahapan yang telah diuraikan di atas, dokumen PPAS Kabupaten Parigi Moutong memuat rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2023. Substansi dokumen PPAS dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran dan target

kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan, organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja operasi dan belanja modal.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 adalah meningkatkan keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan PPAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010-2030;

BAB II

RENCANA PENDAPATAN, BELANJA

DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam KUA Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2022 - 2023

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
4	Pendapatan Daerah	1.585.713.134.965,00	1.553.485.708.130,00	(32.227.426.835,00)
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	121.221.345.706,00	115.243.095.719,00	(5.978.249.987,00)
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	14.700.000.000,00	14.705.000.000,00	5.000.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	13.726.982.000,00	10.897.974.313,00	(2.829.007.687,00)
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.408.666.406,00	2.408.666.406,00	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	90.385.697.300,00	87.231.455.000,00	(3.154.242.300,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.461.991.789.259,00	1.435.742.612.411,00	(26.249.176.848,00)
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.412.553.827.002,00	1.389.264.054.648,00	(23.289.772.354,00)
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	49.437.962.257,00	46.478.557.763,00	(2.959.404.494,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.585.713.134.965,00	1.553.485.708.130,00	(32.227.426.835,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Total Pendapatan Daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.1.553.485.708.130,00 mengalami penurunan 2,03% dari tahun 2022 sebesar Rp.32.227.426.835,00.

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan daerah serta penurunan pendapatan dari Transfer Dana Perimbangan pada DAU dan DAK.

Tabel 2.2
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2022 - 2023

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
5.	JUMLAH BELANJA	1.605.525.433.498,00	1.547.485.708.129,00	(58.039.725.369,00)
5.1.	BELANJA OPERASI	1.124.636.352.456,00	1.017.752.150.462,00	(106.884.201.994,00)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	675.405.892.466,00	593.182.144.878,00	(82.223.747.588,00)
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	312.754.225.386,00	414.379.100.084,00	101.624.874.698,00
5.1.3	BELANJA BUNGA	600.000.000,00	600.000.000,00	-
5.1.5	BELANJA HIBAH	133.076.234.604,00	6.790.905.500,00	(126.285.329.104,00)
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	-
5.2	BELANJA MODAL	165.369.341.542,00	191.166.218.936,00	25.796.877.394,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	30.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	310.519.739.500,00	308.567.338.731,00	(1.952.400.769,00)
	JUMLAH BELANJA	1.605.525.433.498,00	1.547.485.708.129,00	(58.039.725.369,00)

Proyeksi Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,61% atau sebesar Rp.58.039.725.369,- dari APBD Tahun 2022.

Tabel 2.4
Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2022 - 2023

Kode Rekening	Uraian	APBD 2022	Proyeksi 2023	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	19.812.298.533,00	- 6.000.000.000,00	(25.812.298.533,00)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	20.745.631.866,00	-	(20.745.631.866,00)
6.1.1.	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	20.745.631.866,00	-	(20.745.631.866,00)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	933.333.333,00	6.000.000.000,00	5.066.666.667,00
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	933.333.333,00	1.000.000.000,00	66.666.667,00
6.2.1.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	933.333.333,00	1.000.000.000,00	-
6.2.1.01.01	Penerusan Pinjaman dari pemerintah Pusat (IBRD)	933.333.333,00	1.000.000.000,00	
	Penyertaan Modal PT. Bank Sulteng	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	19.812.298.533,00	(6.000.000.000,00)	(25.812.298.533,00)

BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan, dan untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan maka sasaran dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023 selalu berpedoman pada RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan tahun 2023 ini merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Parigi Moutong Tahun 2019-2023, perencanaan tahun 2023 dirumuskan berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023, hasil evaluasi RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja RPJMD tahun 2021, identifikasi isu strategis, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Pada tahap kelima ini upaya peningkatan keunggulan kompetitif Kabupaten Parigi Moutong dalam bidang pertanian dan pariwisata perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Parigi Moutong terhadap pencapaian pembangunan menyeluruh baik provinsi maupun nasional, dengan fokus pembangunan lebih diorientasikan dalam mewujudkan Kabupaten Parigi Moutong keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah.

Rumusan visi RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023
yaitu :

**“MEMANTAPKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TERDEPAN, MAJU, ADIL, MERATA, BERKELANJUTAN
DAN BERDAYA SAING”**

Dalam Rangka pencapaian visi yang telah di tetapkan, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023 ditetapkan 8 (delapan) misi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel
2. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang maju dan merata di seluruh wilayah
3. Memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan mengentaskan kemiskinan
5. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan investasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan-kecamatan terdepan
7. Meningkatkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi kebencanaan
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban diseluruh wilayah

Guna mewujudkan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019-2023 maka rencana kerja pembangunan daerah tahun 2023 berfokus terhadap upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Parigi Moutong tahap lima tahun 2019-2023 dengan tetap memperhatikan permasalahan pembangunan daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di perlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak di capai, tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah akan di terjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Masih berlangsungnya kondisi pandemi covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021, maka sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada tahun 2023 masih difokuskan pada pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi covid-19. Sasaran makro pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah yang akan dicapai pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9
- 2) Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35
- 3) Tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 7,0 – 8,0
- 4) Tingkat pengangguran menjadi sebesar 5,3 – 6,0
- 5) Laju Inflasi 3%

Selanjutnya sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dicapai pada akhir tahun 2023 adalah;

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 10,36 %
2. Indeks Pembangunan Manusia 71,27 poin
3. Tingkat kemiskinan 10,84 %
4. Tingkat Pengangguran terbuka 2,84 %

Adapun rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang hendak dicapai pada tahun 2023 yang disusun dengan mengacu pada

RPJMD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel 3.I di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran RKPD Tahun 2023 Menurut Visi, Misi

No	Misi	TUJUAN		SASARAN			
		URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
1	Memantapkan reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel	1	Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi			
					1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
					2	Meningkatnya level maturitas pengawasan internal	Level Maturitas Pengawasan Internal
					3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK
2	Memantapkan pembangunan infrastruktur yang maju dan merata di seluruh wilayah	1	Meningkatkan pemerataan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan wilayah	Rata-rata Capaian Infrastruktur Dasar			
					1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase rumah tangga berakses air bersih
							Persentase rumah tinggal bersanitasi
					Persentase Rumah layak huni		
3	Memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing	1	Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia Parigi Moutong	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
					1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah Rata-rata lama sekolah
					2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup Prevalensi Stunting
4	Meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan mengentaskan kemiskinan	1	Mengurangi kesenjangan antar wilayah dan pengentasan kemiskinan	Indeks Gini			
					1	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin

No	Misi	TUJUAN		SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	
				2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
5	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan meningkatkan investasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing	1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif		Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE)	
				1	Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita
				2	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor Pariwisata , terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
				3	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100)	Nilai Tukar Petani (NTP)
				4	Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)
				5	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN	Nilai Realisasi investasi PMA dan PMDN

No	Misi	TUJUAN			SASARAN			
		URAIAN		INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
6	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan-kecamatan terdepan.	1	Meningkatkan daya saing daerah		Indeks daya saing daerah			
					1	Meningkatnya ekosistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	
		2	Meningkatkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		Indeks Pembangunan Gender			
					1	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	
		3	Meningkatkan kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun			
						1	Meningkatnya status Desa Maju berdasarkan IDM	Persentase Desa berstatus Maju
7	Meningkatkan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi kebencanaan	1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menopang pengurangan resiko bencana		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)			
						1	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
						2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
						3	Meningkatkan Kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan
		4	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)				
8	Meningkatkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah	1	Meningkatkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase warga yang mendapatkan layanan akibat penegakkan hukum peraturan daerah atau peraturan Bupati			
						1	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran K3	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong. Prioritas dan sasaran pembangunan Parigi Moutong Tahun 2023 adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan, dalam merencanakan pembangunan tidak terlepas dari target yang sudah ditetapkan yang dapat dilihat pada Bab VI tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

Berdasarkan perkembangan kondisi tahun 2021 ini fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di semua bidang, dengan sebagian besar modal pembangunan berasal dari kekuatan sendiri. Keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

No	PRIORITAS	SASARAN			Satuan	TARGET
		URAIAN	INDIKATOR			
1	Memantapkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, berkelanjutan dan Berdaya Saing	-	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Harapan lama sekolah	Tahun	12,87
		-	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,98
2	Memantapkan pelayanan kesehatan prima bagi warga Parigi Moutong	-	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,99
				Prevalensi Stunting	Persen	26
3	Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Persen	95
				Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	58
				Persentase Rumah layak huni	Persen	92,47
		-	Meningkatnya status Desa Maju berdasarkan IDM	Persentase Desa berstatus Maju	Persen	7,91
4	Menata Birokrasi (<i>E-GOVERNANCE</i> & <i>E-</i>	-	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai akuntabilitas	Nilai	70

No	PRIORITAS	SASARAN		Satuan	TARGET	
		URAIAN	INDIKATOR			
	GOVERNMENT) dan Pelayanan Berbasis Online.		pemerintah daerah	kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		
		-	Meningkatnya level maturitas pengawasan internal	Level Maturitas Pengawasan Internal	Level	3
		-	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	Opini	WTP
		-	Meningkatnya ekosistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Poin	2,75
5	Percepatan Pengentasan kemiskinan berbasis Komunitas masyarakat Miskin Terpencil	-	Menurunnya persentase penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	Persen	13,68
		-	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	2,49
		-	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,77
6	Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	-	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	64,99
				Prevalensi Stunting	Persen	26
7	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan investasi berbasis pertanian dan pariwisata.	-	Meningkatnya PDRB perkapita	PDRB Perkapita	Berlaku Rp. (juta)	44,887
					Konstan Rp. (juta)	26,086

No	PRIORITAS	SASARAN		Satuan	TARGET	
		URAIAN	INDIKATOR			
		-	Meningkatnya PDRB perkapita Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap PDRB	Persen	41,66
				Persentase kontribusi sektor Pariwisata, terhadap PDRB	Persen	1,20
		-	Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan (NTP=100)	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	103
		-	Meningkatkan ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Persen	79,3
8	Pembangunan dan Pemberdayaan UKM dan IKM melalui Sentra dan <i>E-Smart</i>	-	Meningkatnya PDRB perkapita Meningkatnya kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	2,67
				Persentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	17,74
		-	Meningkatnya investasi	Nilai Realisasi	Rp.	349,6

No	PRIORITAS	SASARAN		Satuan	TARGET	
		URAIAN	INDIKATOR			
			PMA dan PMDN	investasi PMA dan PMDN	(Milyar)	
9	Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana melalui perlindungan dan rehabilitasi lingkungan.	-	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Poin	65,39
		-	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Poin	94,76
		-	Meningkatkan Kualitas tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan	Poin	78,69
		-	Meningkatnya Ketangguhan masyarakat terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	poin	105
10	Peningkatan rasa aman, damai, tertib bagi seluruh masyarakat Parigi Moutong.	-	Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran K3	Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran K3	Persen	100
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	62,5

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan permasalahan utama pembangunan daerah seperti yang diuraikan pada Bab II, isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN, isu strategis pembangunan Provinsi serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka isu strategis pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah yang belum yang belum optimal. Serta pelayanan publik berbasis IT.
2. Adanya Ketimpangan Pembangunan infrastruktur antar wilayah
3. Kualitas Sumber daya manusia (SDM), mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Rendah.
4. Upaya peningkatan Kesejahteraan sosial yang berkeadilan belum optimal sehingga Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah yang dilihat dari nilai tukar petani (NTP) masih rendah
5. Angka Kemiskinan Masih Sangat Tinggi .
6. Pembangunan ekonomi daerah masih berjalan lambat dan pengembangan pertanian, pariwisata daerah belum optimal.
7. Sektor Industri dan UKM yang optimal didalam memberikan kontribusi pada kemajuan daerah.
8. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan belum optimal.
9. Penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup (DTDD-LH) dan upaya mitigasi kebencanaan belum optimal.
10. Tingkat kerawanan keamanan dan ketertiban disebagian wilayah masih tinggi.

4.2.1.1. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Belum Optimal Serta Pelayanan Publik Berbasis IT

Menggerakkan reformasi birokrasi melalui institusi Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemda Kabupaten Parigi Moutong adalah subjek reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan

penilaian mandiri atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan mereka lakukan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang kesuksesan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dimasa yang akan datang.

Langkah menjalankan reformasi birokrasi tentu bukan perkara mudah harus menjadi komitmen semua pihak. Reformasi birokrasi hanya terjadi bila adanya dua hal yaitu pertama ada konsistensi: teguh, selalu memikirkan kelanjutan dan berkarakter. Kedua, konsekuen: cakap dalam tugas, sederhana, dan dapat diandalkan ketika melakukan banyak hal.

Pelayanan publik atau pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah masih dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah birokrat dan bentuk birokrasinya yang berbelit-belit sehingga diperlukan langkah konkret di dalam memperbaiki kinerja birokrasi. Hal itu terlihat dari masih adanya keluhan dan pengaduan masyarakat baik itu disampaikan secara langsung maupun melalui media massa atau bahkan media social. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan langkah strategis yang terpadu dan berbasis teknologi guna menjawab permasalahan dan tantangan di masa mendatang. Dengan pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien serta membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong setidaknya didalam periode tahun 2019-2023.

4.2.1.2. Adanya Ketimpangan Pembangunan infrastruktur antar wilayah

Permasalahan strategis yang masih belum dapat diselesaikan di secara umum di Kabupaten Parigi Moutong adalah permasalahan mengenai ketimpangan wilayah atau ketimpangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah atau antara desa (rural) dan kota (urban). Beberapa daerah Kecamatan mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Ketimpangan pembangunan antar Kecamatan menjadi perhatian penting dimasa yang akan datang di Kabupaten Parigi Moutong.

Pemerintah Pusat saat ini terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, guna pemerataan ekonomi dan juga menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah peluang sekaligus tantangan pembangunan ini juga akan menjadi fokus pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong di masa mendatang. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang secara masif di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dilakukan dengan harapan dapat memacu Bergeraknya ekonomi, sehingga perekonomian daerah tidak hanya tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Parigi Moutong.

Merujuk analisa data dari World Bank, infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Elastisitas PDRB terhadap infrastruktur di suatu daerah adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDRB sebesar 7% sampai dengan 44%, sehingga variasi angka yang cukup signifikan sumbangsi infrastruktur menjadi penting didalam mengerakan dan mengatasi ketimpangan pembangunan.

Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier

effect kepada kemajuan daerah disegala bidang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan menyebar di berbagai wilayah di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan merupakan bentuk dari 'Regional Growth Strategy', utamanya dalam mengatasi masalah pembangunan, yaitu tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing Kabupaten Parigi Moutong pada masa mendatang.

4.2.1.3 Kualitas Sumber daya manusia (SDM), mengakibatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih Rendah

Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa bahkan daerah. Pendidikan dan Kesehatan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan layanan pendidikan dan kesehatan kepada penduduknya. Kondisi Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong masih rendahnya dimana terdapat penduduk usia sekolah yang tidak/belum sekolah dan buta huruf, Sebagian besar Indikator Pendidikan masih berada di bawah rata-rata Provinsi, Program pendidikan wajar 9 tahun belum tuntas, yang di tunjukan oleh Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,47 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah sangat rendah sebesar 7,88 Tahun, Angka Buta huruf masih ada 0,67%, Angka Partisipasi Kasar (APK)tahun 2020 dimana SD (90,75), SMP (72,71); Angka Partisipasi Murni (APM)tahun 2020 dimana SD (90,75), SMP (72,71), Angka Partisipasi Sekolah (APS)tahun 2020 dimana SD (96,94%), SMP (91,13%). Sementara indicator Kesehatan juga memiliki permasalahan atau isu strategis yang akan dibenahi dimasa yang akan datang. Dimana Usia Harapan Hidup (UHH) rendah yaitu 64,30 Tahun pada tahun 2020, sehingga perlu upaya nyata peningkatan, Masih tingginya kasus

kematian Ibu dan bayi, Angka Stunting masih Tinggi 11,4 % tahun 2020, Angka prevalensi kurang gizi dan Gizi Buruk masih ditemukan, Rasio tenaga medis persatuan penduduk belum memadai serta Kesadaran akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.

Dimana diketahui bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk dan makin baiknya kualitas kesehatan masyarakatnya, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Parigi Moutong dalam konteks Sulawesi Tengah, tahun 2020 pada umumnya termasuk dalam kategori menengah ke atas. Angka capaian IPM 65,44 menurun dari sebelumnya 65,47 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Dilihat dari sisi pencapaiannya, peningkatan tertinggi pada indeks, diikuti indeks daya beli dan kesehatan sementara Indeks Pendidikan dan Kesehatan masih perlu kerja keras. Indikator (indeks) ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada aspek ekonomi di kabupaten Parigi Moutong.

4.2.1.4 Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Yang Berkeadilan Belum Optimal Sehingga Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Nelayan Masih Rendah Yang Dilihat Dari Nilai Tukar Petani (NTP) Masih Rendah

Sumberdaya sosial dalam masyarakat memiliki nilai vital sendiri dalam keberlangsungan hidup masyarakat suatu wilayah. Setidaknya ada 5 (lima) aspek yang perlu disiasati pemerintah daerah agar produktivitas ekonomi masyarakat dapat merangkak naik: Pendidikan (education), kesehatan (healthy), perumahan (housing), jaminan sosial (social security), dan pengentasan kemiskinan (poverty reduction). Kelima aspek yang turut menyokong sumberdaya sosial ini mampu

mendorong kesejahteraan ke arah yang lebih cemerlang. Karena pergerakan kesejahteraan sosial hampir selalu paralel dengan pertumbuhan ekonomi, maka apabila kelima aspek di atas dapat dipenuhi, potensi capaian kesejahteraan lebih mudah diraih.

Peran pemerintah yang utama yakni harus mampu menjamin bahwa ketersediaan sumberdaya sosial bersama dengan masyarakat untuk mencegah ketimpangan sosial antar masyarakat dan antar kelompok. Setiap daerah termasuk Kabupaten Parigi Moutong sebagai daerah yang tengah berkembang secara linier mengalami berbagai gejolak perubahan sosial termasuk masih tingginya angka kemiskinan yang apabila tidak diselesaikan dengan upaya nyata didalam menurunkan angka kemiskinan secara bertahap, daerah ini dapat terjerumus ke dalam keterbelakangan atas kerentanan sosial yang tak terpuhkan. Kedua, sumberdaya sosial yang baik mampu memperbaiki taraf hidup secara nyata. Hal ini semakin dipertegas bahwa kualitas hidup tidak dapat berpatokan hanya kepada pertumbuhan ekonomi semata. Ketiga, sumberdaya sosial berusaha meratakan kehidupan ekonomi-sosial masyarakat. Bentuk ketimpangan ini terlihat pada takaran relasi hubungan antar individu dalam strata sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pelayanan sosial, bantuan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pendekatan yang menitikberatkan kemandirian, potensi serta partisipasi umum.

Dalam kenyataannya pelayanan sosial di daerah belum terselenggara secara optimal. Penggunaan pendekatan yang belum tepat dalam mengidentifikasi masalah sosial menjadi faktor utama. Peranan pemerintah yang secara konstitusional dengan mengintervensi melalui kebijakan sosial memiliki tanggungjawab paling besar dalam pelayanan sosial, dan mampu menyediakan fasilitas pelayanan sosial termasuk ketika situasi berada dalam kondisi darurat seperti bencana alam.

Adanya program pelayanan sosial yang salah sasaran, perlu menjadi fokus untuk perbaikan di masa mendatang.

4.2.1.5 Angka Kemiskinan Masih Sangat Tinggi

Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut, maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang juga beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (i) secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat, (ii) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (iii) rendahnya partisipasi masyarakat, (iv) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (v)menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (vi) kemungkinan merosotnya mutu atau daya saing generasi yang akan datang. Semua indikasi tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, tetapi faktanya masih banyak masyarakat miskin atau golongan menengah kebawah yang berada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan saat ini. terutama di daerah Komunitas adat terpencil (KAT). Untuk tahun 2020 persentase penduduk miskin Kabupaten se Sulawesi Tengah menempatkan Kabupaten Parigi Moutong berada pada posisi ketiga yang

memiliki angka penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan angka penduduk miskin sebesar 15,85% atau 78.760 jiwa pada tahun 2020.

Sejalan dengan hal itu Konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sector. Masalah Kemiskinan akan lebih cepat diatasi bila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam usaha mencapai target pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong selain mengandalkan Program Keluarga Harapan (PKH) juga akan menginisiasi program gerakan Terdepan Pembangunan Masyarakat Parigi Moutong (Garda-Emas) dengan fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan dan bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang makmur dan sejahtera.

4.2.1,6 Pembangunan Ekonomi Daerah Masih Berjalan Lambat Dan Pengembangan Pertanian, Pariwisata Daerah Belum Optimal

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadinya pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja.

Tidak hanya daerah berkembang dan emerging, seringkali di daerah maju juga memiliki tantangan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya.

Bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir di tengah masyarakat.

Salah satu sektor yang sangat terkait dalam proses pembangunan di kabupaten Parigi Moutong adalah sektor pertanian dalam arti yang luas dan Pariwisata. Kedua sektor ini yang memiliki potensi yang begitu besar. Sektor pertanian yang dimaksud adalah sektor yang mencakup sub sektor yang meliputi seperti pertanian sawah, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan sementara Pariwisata menyangkut pengembangan destinasi unggulan dan Industri yang mendukung pariwisata daerah sehingga Pembangunan pada kedua sektor unggulan ini dapat memajukan dan mengsejahterakan masyarakatnya dimana distribusi pendapatan dan pemerataan serta keadilan dapat diwujudkan.

4.2.1.7 Sektor Industri dan UKM Yang Belum Optimal Didalam Memberikan Kontribusi Pada Kemajuan Daerah

Ketika terjadi krisis, industri besar menghadapi masalah serius sedangkan IKM-UKM bekerja menurut ritme keunggulannya. Dua pola pertumbuhan industri berbeda karena antara lain menggunakan bahan baku bersumber dari dalam negeri, pemakaian tenaga kerja dengan upah yang

rendah dan relatif cepat bergerak kearah penyesuaian pemakaian bahan baku dan berorientasi pasar.

Ketiga faktor diatas menempatkan IKM-UKM disalah satu pihak mampu menunjukkan diri menjadi usaha yang memiliki keunggulan daya saing dan dinamika dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun di daerah bahkan para ahli melihat kenyataan dan berpendapat bahwa proses pemulihan ekonomi yang ditunjang oleh meningkatnya peran IKM-UKM secara signifikan sebagai jalan keluar didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sampai di tingkat Desa/kelurahan. Daya tahan UKM dalam pemulihan krisis ekonomi, menunjukkan bahwa selain sebagai penangkal krisis juga memiliki peran yang sangat strategis dalam ekonomi suatu wilayah.

IKM-UKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan IKM-UKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah IKM-UKM setiap tahunnya termasuk di Kabupaten Parigi Moutong saat ini. Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha skala kecil dan menengah (UKM) di suatu wilayah dan daerah berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Begitu pula dengan kondisi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, meskipun dalam ukuran sumbangan terhadap PDRB belum terlalu besar, sektor ini dapat tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi daerah. Sehingga perannya diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.

UKM Pada tingkat Desa akan didorong dengan penggunaan dana desa bagi berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang

seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan UKM didesa dimana sasarannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan, pendapatan desa ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Kuncinya adalah pengelolaan dari pihak desa yang baik. Aset yang dimilikinya bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan benefit. Benefit inilah yang secara tidak langsung akan menjadi tonggak utama dalam menambah pendapatan desa dan memajukan usaha sektor unggulan daerah Kabupaten Parigi Moutong berbasis desa.

4.2.1.8 Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Kecamatan Dan Desa/Kelurahan Belum Optimal

Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan. Kecamatan selama ini diatur secara rinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur khusus tentang kecamatan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa “memaksa” pemerintah untuk memikirkan kembali peran kecamatan, terutama dalam rangka mendorong kemandirian desa, melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Karena tujuan dibentuknya UU Desa sendiri diantaranya adalah: a) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; b) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; c) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; d) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta

mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan e) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-Undang Desa ini memandatkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah (Pasal 112 ayat 1 dan 2). Salah satunya adalah camat.

Pembangunan yang merata juga harus pula dirancang sejak awal sehingga sehingga pembangunan tak lagi hanya terpusat di kota. Hal ini, untuk menghindari terjadilah ketimpangan yang tinggi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan juga terjadi antara desa dengan kota antar kecamatan. Selama ini daerah perkotaan mendapatkan lebih banyak porsi membangun dibanding desa sehingga perkembangan di wilayah pedesaan sangat kecil. Kebijakan yang bisa dilakukan kota inilah salah satu yang memicu anak-anak muda desa lebih tertarik hidup dan bekerja di kota dibanding di desanya.

Dana desa mengusung banyak perubahan bagi desa karena memberikan wewenang sepenuhnya pada desa mengembangkan kesejahteraan ekonomi dengan berbasis pada potensi dan aset yang dimilikinya. Ketimpangan lainnya adalah terjadinya penguasaan sumber daya alam di daerah yang belum mampu mengelolanya dan justru dikuasai oleh kekuatan modal dari daerah lain. Alhasil, daerah penghasil sumber daya alam yang seharusnya mendapatkan porsi besar malah hanya menjadi penonton. Kondisi ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari kondisi atau status desa di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 dimana jumlah desa sangat tertinggal 1 Desa atau 0,36% dan jumlah Desa tertinggal 18 dari 278 Desa atau 6,4 Untuk itu upaya peningkatan status desa tertinggal dan sangat tertinggal merupakan isu strategis daerah yang diperlukan didalam menyelesaikan tanggungjawab pemerintah daerah saat ini.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Parigi Moutong, maka keberadaan kecamatan akan dimanfaatkan secara optimal didalam percepatan pengetasan desa tertinggal dan sangat tertinggal, sehingga anggaran dan fasilitas yang digunakan untuk pembiayaan kecamatan dapat memberi manfaat besar bagi masyarakat, termasuk masyarakat desa. Upaya membenahi peran kecamatan sejatinya telah lama dilakukan, salah satunya melalui pengawasan dalam pembangunan desa dan peningkatan kapasitas dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi, melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang menjadi agenda pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

4.2.1.9 Daya Tampung Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DTDD-LH) Dan Upaya Mitigasi Kebencanaan

Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang 23 Tahun 1997, amanat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang dalam sejumlah pasal, diantaranya Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang

dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berkaitan dengan daya dukung untuk penyediaan pangan maka daya dukung lahan menjadi Isu penting agar dapat diketahui ketersediaan pangan. Daya dukung (carrying capacity) diartikan sebagai kapasitas atau kemampuan lahan yang berupa lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Analisis daya dukung berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wacana ini dapat dibuktikan melalui berbagai hasil kajian dan penelitian yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan penyediaan bahan makanan jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk artinya populasi manusia cenderung tumbuh secara eksponensial sementara produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia tumbuh mengikuti hukum aritmatik.

Pada aspek lain mitigasi bencana merupakan salah satu isu penting di Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan data yang tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia yang dikelaurkan oleh BNPB, bencana yang pernah terjadi di wilayah ini adalah bencana banjir, banjir bandang, gempa bumi, kekeringan dan cuaca ekstrim (Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Parigi Moutong, 2018 – 2022).

Berdasarkan hasil pengkajian resiko bencana yang ada di Kabupaten Parigi Moutong, dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi, dimana potensi tersebut dihitung berdasarkan parameter yang berbeda untuk setiap jenis bahaya dengan mengacu pada standar dan pedoman pengkajian resiko

bencana. Berdasarkan luasan bahaya tersebut maka dapat dihitung daya dukung kawasan rawan bencana potensial yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.

Selain indikator indeks kawasan rawan bencana potensial, indikator lainnya yang dapat digunakan untuk menganalisis daya dukung kawasan rawan bencana, adalah indeks potensi kerusakan di kawasan rawan bencana, baik berdasarkan potensi penduduk yang terdampak maupun jumlah rumah yang berpotensi terdampak.

4.2.1.10 Tingkat Kerawanan, Keamanan Dan Ketertiban Disebagian Wilayah Masih Tinggi

Salah satu eksek lebih lanjut dari supremasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dan subordinasi pembangunan sosial budaya yang dapat dirasakan adalah kurang berkembangnya kesadaran sosial dan budaya hukum. Adanya indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk konflik, meningkatnya gangguan keamanan, menurunnya ketertiban umum, meningkatnya penyalagunaan Napsa dikalangan generasi muda dan meningkatnya kriminalitas menunjukkan adanya penurunan kesadaran sosial dan belum berkembangnya budaya hukum.

Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat sehingga akan berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan. Menurunnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat juga akan memberi pengaruh psikologis yang negatif bagi masyarakat akibat adanya kekhawatiran yang berlebihan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mengganggu aktivitas dan produktivitas masyarakat. Di samping itu, peningkatan intensitas tindak kekerasan dalam masyarakat secara psikologis juga akan merangsang timbulnya perilaku

kekerasan yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Belum perkembangnya budaya hukum dan adanya indikasi kerawanan sosial dan keamanan merupakan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaran pemerintahan hendaknya dapat dicermati dan mendapat perhatian mengenai ancaman potensi konflik di dalam masyarakat dan merabaknya penyalahgunaan narkoba serta meningkatnya kasus kriminal sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Perlu dilakukan pengembangan kemitraan pemerintah dengan penegak hukum dan masyarakat serta pemantapan koordinasi di semua tingkatan baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda.

Diakui, kondisi kemananan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) maupun jalannya roda pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Parigi Moutong hingga kini berjalan dengan baik. Pemerintah melalui peran Satpol PP merupakan salah satu aparaturnya penegak disiplin, pengayom dan pendorong terciptanya keamanan dan ketertiban serta penegak diterapkannya Perda dan peraturan pelaksanaan dalam lingkup dinas/instansi pemerintah dan masyarakat. Agenda pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan semakin besar dan menuntut kesiapan bersama untuk menyukseskannya sesuai program prioritas pembangunan yang tertuang dalam agenda Visi Misi daerah terkait upaya menekan angka kerawanan dan meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.

Dalam rangka menjawab isu strategi tersebut perlu dirumuskan tema pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023. Adapun rancangan tema pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2023 adalah :

“Membangun Daya Saing Berbasis Sumberdaya Unggulan Daerah”

Untuk mewujudkan tema pembangunan daerah pada tahun 2023, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong agar dapat memberi arah pembangunan yang jelas. Selanjutnya agar setiap prioritas pembangunan dapat diimplementasikan lebih terarah, maka prioritas tahun 2023 difokuskan pada ruang lingkup kegiatan sebagaimana tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Prioritas, Fokus dan Ruang lingkup Kegiatan Pembangunan Tahun 2023

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)
Memantapkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, berkelanjutan dan Berdaya Saing	Peningkatan mutu dan akses pendidikan	- Pembangunan / Rehab prasarana pendidikan
		- Pengadaan / bantuan sarana belajar mengajar
		- Pembangunan / perbaikan jalan (akses) ke fasilitas pendidikan
		- Pelatihan tenaga pendidik
		- Penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih sekolah
		- Advokasi penguatan peran keluarga dalam program wajib belajar
		- Penguatan PKBM
		- Layanan perpustakaan keliling
		- Lomba literasi
		- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
		- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun,updating, dan pemeliharaan)
		- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
		- Pengembangan data base kependudukan
		- Sosialisasi kebijakan kependudukan
	- Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	
Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	- Penyelenggaraan Akreditasi TK/PAUD, SD, SMP	
	- Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	
	- Penyusunan Profil Pendidikan dan Laporan Capaian SPM Pendidikan	
	- Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan menuju akses pendidikan	

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)
Memantapkan pelayanan kesehatan prima bagi warga Parigi Moutong	Peningkatan derajat kesehatan	- Pembangunan/rehab prasarana/fasilitas kesehatan
		- Pengadaan sarana kesehatan
		- Pembangunan/pemeliharaan jalan (akses) ke fasilitas kesehatan
		- Pelatihan tenaga kesehatan
		- Peningkatan jangkauan pelayanan masyarakat miskin/terpencil
		- Peningkatan jangkauan pelayanan masyarakat miskin/terpencil
		- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
		- Kajian pembinaan dan pengembangan sistim informasi sosial (penerima bantuan Iuran PBI-JKN)
		- Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
		- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
		- Pembinaan Keluarga Berencana
		- Pelayanan KIE
		- Pelayanan konseling KB bagi PUS
		Pencegahan dan penanganan STUNTING
	- Pemberian vitamin / makanan tambahan	
	- Peningkatan layanan ibu hamil	
	- Peningkatan layanan bayi/balita	
	- Penyuluhan kesehatan reproduksi pada kelompok PUS dan remaja	
	- Penyuluhan sumber protein alternatif	
	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	- Penguatan peran pemerintahan desa dalam rangka pencegahan stunting
		- Penyediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi
	Peningkatan penduduk yang memiliki akses air minum layak	- Penyuluhan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
		- Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan menuju akses kesehatan
		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaian di Kawasan Perkotaan
		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaian di Kawasan Perdesaan
		- Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM
- Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan		
- Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan		
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan		
Peningkatan penduduk yang memiliki akses sanitasi layak	- Pembangunan/Penyediaan sub Sistem Pengelolaan Setempat	
	- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)	
	Penyediaan perumahan dan pemukiman kota bagi warga	- Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	
		- Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
		- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan air Limbah domestik	
		- Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
		- Perbaiki rumah tidak layak huni	
		- Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian	
		- Perencanaan penyediaan PSU perumahan	
		- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
		- Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	
		- Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (dirasakan/dinikmati oleh masyarakat) dan investasi berbasis pertanian dan pariwisata.	Peningkatan produksi dalam rangka menjamin ketersediaan pangan	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar	
	Peningkatan cakupan lahan pertanian yang teraliri	Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	
		- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
		- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
	Dukungan Ketersediaan Pangan Kebutuhan IKN	- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
		Peningkatan Produksi Pangan unggulan	
		penyediaan kebijakan daerah (perda/perbup) sebagai landasan formal.	
		alur distribusi peran perusda	
			keterlibatan peran Bumdes dalam menyiapkan produksi pertanian, peternakan, perikanan
	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	- Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan menuju akses kantong produksi dan akses perekonomian	
Pembangunan dan Pemberdayaan UKM dan IKM melalui Sentra dan E-Smart	Diversifikasi hasil olahan perikanan	- Bantuan sarana pengolahan hasil perikanan	
		- Pelatihan penganekaragaman olahan hasil perikanan	
		- Penguatan kelompok pengolah hasil perikanan	

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)
	Penyediaan informasi pasar dan peningkatan produk bagi pelaku usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan akses layanan informasi pasar - Penyediaan akses perijinan usaha - Fasilitasi Promosi Produk IKM - Pengembangan Usaha Koperasi - Peningkatan Mutu Usaha UKM - Pembinaan dan Pengembangan Usaha pelaku usaha untuk menghasilkan Produk Ekspor - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, - Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi kebencanaan melalui perlindungan dan rehabilitasi lingkungan.	- Penanganan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Sampah - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	- Kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	- Ketangguhan masyarakat terhadap bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
	- Kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (pemukiman)	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)
Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah	Peningkatan infrastruktur perhubungan (darat dan laut)	- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
		- Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
		- Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
		- Pembangunan Gedung Terminal
		- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
		- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Menata Birokrasi (<i>E-GOVERNANCE</i> & <i>E-GOVERNMENT</i>) dan Pelayanan Berbasis Online.	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah
		- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
		- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Percepatan Pengentasan kemiskinan berbasis Komunitas Masyarakat Miskin Terpencil	Pengentasan kemiskinan	- Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		- Peningkatan Kesempatan Kerja
		- Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan rasa aman, damai, tertib bagi seluruh	Peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan dan pencegahan tindak kriminal	- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
		- Sosialisasi Deradikalisasi

PRIORITAS	FOKUS	KEGIATAN PRIORITAS (Indikator)
masyarakat Parigi Moutong.		<ul style="list-style-type: none"> - Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD) - Deteksi Dini Pelanggaran PERDA dan Pelanggaran Tibumtranmas

Keterkaitan antara Prioritas Nasional tahun 2023 dan prioritas daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2023

No	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2023
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan investasi berbasis pertanian dan pariwisata. (7) 2. Pembangunan dan Pemberdayaan UKM dan IKM melalui Sentra dan <i>E-Smart</i>. (8)
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Pengentasan kemiskinan berbasis Komunitas masyarakat Miskin Terpencil (5)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, berkelanjutan dan Berdaya Saing (1) 2. Memantapkan pelayanan kesehatan prima bagi warga Parigi Moutong (2) 3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (6)
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan rasa aman, damai, tertib bagi seluruh masyarakat Parigi Moutong. (10)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (3)

No	Prioritas Pembangunan Nasional 2023	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong 2023
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.	1. Pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi kebencanaan melalui perlindungan dan rehabilitasi lingkungan (9)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	1. Menata Birokrasi (<i>E-GOVERNANCE</i> & <i>E-GOVERNMENT</i>) dan Pelayanan Berbasis Online. (4)

Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, dan prioritas daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5
Keterkaitan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Parigi Moutong
1	Penanggulangan Korban Bencana	1. Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (3)
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	1. Memantapkan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang terjangkau, berkelanjutan dan Berdaya Saing (1) 2. Memantapkan pelayanan kesehatan prima bagi warga Parigi Moutong (2) 3. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
	Penigkatan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah	1. Mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (3)
	Mendorong Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan Perikanan, Peternakan dan Komoditas Peertanian Lainnya	3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan investasi berbasis pertanian dan pariwisata. (7) 4. Pembangunan dan Pemberdayaan UKM dan IKM melalui Sentra dan <i>E-Smart</i> . (8)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN OPD

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai tabel berikut (lampiran ..)

BAB V

PENUTUP

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran, maka Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen PPAS Kabupaten Parigi Moutong ini dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.

Parigi, 10 Juli 2022

BUPATI PARIGI MOUTONG



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU